



ANALISIS PENYUSUNAN POLICY PAPER DALAM PENGUATAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BADAN RISET DAN INOVASI PROVINSI JAWA TIMUR

Rafly Arif Firzatullah Parastowo

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah. BRIDA berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dengan fokus pada penelitian yang aplikatif dan relevan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangan BRIDA, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BRIDA memiliki potensi besar, terdapat kendala signifikan terkait kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam inovasi. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan BRIDA dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

Kata Kunci: Penguatan, Kelembagaan, BRIDA.

PENDAHULUAN

Dalam memperkuat dan mengembangkan sistem ilmiah serta teknologi di Indonesia, perlu menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan inovasi dan daya

saing bangsa. Pemerintah berfokus pada penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membangun sistem informasi nasional yang mendukung

jaringan ilmu pengetahuan, dengan harapan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) (Indonesia, 2019).

Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yaitu pentingnya penelitian dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Undang – Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan yang berkontribusi pada pembangunan nasional perwujudan dari visi “Indonesia Maju 2045”. Kemudian untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat proses perizinan, sehingga memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, perlunya mengintegrasikan pengaturan terkait penelitian dan inovasi dengan Undang – Undang tentang Cipta Kerja mendukung implementasi dalam memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di riset dan pengembangan dengan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dengan itu pengkolaborasian dalam *Omnibus Law* yakni Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2020).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan,

serta penemuan dan inovasi secara terpadu. BRIN juga mengelola penyelenggaraan ketenagakerjaan dan keantariksaan di tingkat nasional. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta penemuan dan inovasi di tingkat daerah. BRIDA berfokus pada integrasi fungsi riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah secara efisien. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah mendapat masukan dari BRIN. Pembentukan BRIDA dapat diselaraskan dengan perangkat daerah yang mengelola perencanaan pembangunan atau penelitian dan pengembangan. Tugas BRIDA mencakup pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta penemuan dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, BRIDA bertanggung jawab untuk menyusun rencana induk dan peta jalan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor kehidupan dengan berpedoman pada nilai Pancasila. Pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BRIDA berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dapat juga diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan BRIDA untuk menjalankan fungsi riset dan inovasi secara lebih efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Dengan itu pembentukan BRIN dan BRIDA bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan Iptek demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia

(Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2021).

Transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah proses perubahan dari lembaga Balitbangda ke BRIDA yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi riset dan inovasi di tingkat daerah, tidak hanya mengubah nomenklatur, tetapi juga memperluas lingkungan kerja dan fungsi lembaga tersebut. Sementara Balitbangda sebelumnya berfokus pada penelitian dan pengembangan untuk mendukung urusan pemerintah daerah, BRIDA dirancang untuk melakukan riset dan inovasi yang lebih luas, termasuk kolaborasi dengan Berbagai pihak yang berkepentingan di daerah, seperti lembaga riset swasta, universitas, dan masyarakat. Perubahan ini juga mencakup redefinisi istilah “penelitian dan pengembangan” menjadi “riset” dengan penekanan pada “inovasi,” yang merupakan bagian integral dari pengembangan. Dengan demikian, BRIDA diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan riset dan inovasi di daerah dengan lebih efisien. Meskipun ada harapan positif terhadap pemajuan Iptek di daerah melalui BRIDA, terdapat keraguan mengenai kemampuan BRIDA untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif. Balitbangda sebelumnya belum sepenuhnya membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah internal di pemerintah daerah, sehingga ada kekhawatiran bahwa BRIDA dengan lingkup kerja yang lebih luas mungkin menghadapi tantangan serupa. Rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti merupakan inti dari fungsi Balitbangda, dan jika lembaga ini tidak mampu memenuhi tugas tersebut, maka efektivitas BRIDA dalam menangani isu – isu yang lebih kompleks juga

dipertanyakan (Fitriana, 2014) (INDONESIA, 2023).

Penguatan kelembagaan BRIDA merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi di tingkat daerah. BRIDA menjadi penghubung antara pemerintah dan pemangku kepentingan, dengan tujuan mendorong penelitian yang relevan dan aplikatif. BRIDA tidak berperan hanya pelaksana riset, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina yang mendukung kebijakan riset dan inovasi. Salah satu aspek pentingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian, BRIDA perlu memastikan bahwa stafnya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas – tugas penelitian dan pengembangan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta sangat perlu dimana untuk memperluas jaringan penelitian dan menciptakan sinergi dalam berbagai inovasi. Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) perlu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Integrasi fungsi BRIDA dengan lembaga lain di daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program riset. Dengan itu, BRIDA dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, penguatan kelembagaan BRIDA diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik, mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan kedepannya (Daerah, 2021)(Dimiyati, 2019).

Masalah yang dihadapi dalam riset dan inovasi di daerah Indonesia terkait dengan kapasitas kelembagaan yang masih kurang kuat, yang dapat dilihat dari tiga aspek : organisasi, tata kelola, dan sumber daya pendukung. Dari segi organisasi, banyak pemerintah

daerah (Pemda) engga membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), dengan hanya 17% dari 548 daerah yang memiliki lembaga tersebut. Sebagian besar daerah memilih untuk mengintegrasikan fungsi kelitbangan ke dalam Bappeda. Dalam hal tata kelola, manajemen riset dan inovasi di Pemda juga dianggap kurang baik. Data dari BRIDA Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa banyak pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki Rencana Induk Kelitbangan atau pedoman pelaksanaan yang jelas.

Dari aspek sumber daya pendukung, Ada kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Pada tahun 2021, Indonesia hanya memiliki 199 peneliti per satu juta penduduk, yang jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Jepang. Selain itu, masalah anggaran juga signifikan banyak daerah tidak mengalokasikan anggaran dengan baik untuk kegiatan riset, dengan rata - rata anggaran hanya sebesar 1,4 miliar rupiah untuk kegiatan riset di kabupaten dan kota. Untuk mengatasi berbagai permasalahan itu, BRIDA Provinsi Jawa Timur perlu menyusun rekomendasi kebijakan melalui kajian berjudul "Penguatan Strategis Kebijakan dalam Pengembangan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Provinsi Jawa Timur". Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kelemahan - kelemahan yang ada dalam organisasi, tata kelola, dan sumber daya pendukung riset dan inovasi di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dalam kajian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan serta langkah - langkah peningkatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan

kajian yang ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah.

Keuntungan metode deskriptif kualitatif adalah kemampuan analisis data yang mendalam dari berbagai sumber dengan perspektif yang berbeda. Hal ini memungkinkan memperoleh informasi yang lebih kaya dan kontekstual, serta memahami fenomena sosial secara lebih holistik. Dengan metode ini, data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan gambaran yang tepat mengenai situasinya. Observasi dilakukan langsung dilapangan yakin Kantor BRIDA Jatim dengan menganalisis laporan *policy paper* mengenai penguatan strategi kebijakan pengembangan kelembagaan badan riset dan inovasi Provinsi Jawa Timur. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait untuk mengumpulkan data yang diinginkan oleh peneliti, serta informasi yang belum diperoleh selama observasi. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang mencakup kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh umumnya bersifat kualitatif, dengan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna, mengeksplorasi keunikan, mengkonstruksi fenomena, serta merumuskan hipotesis (Paramita, 2022).

Dalam penelitian ini diterapkan analisis kebijakan yang menurut Hamdi, fokus utama dari analisis kebijakan adalah mengidentifikasi berbagai alternatif dan memilih salah satu di

antara alternatif tersebut untuk merekomendasikan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan (Ummah, 2019). Berikut beberapa komponen atau unsur penting dalam Analisis Kebijakan menurut Hamdi, komponen pertama ialah **Meta Analysis (Analisis Meta)** Analisis meta adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis aktivitas yang berkaitan dengan pemahaman ide kebijakan publik, yang dilakukan melalui penggunaan metafora. Pendekatan ini meneliti metode yang diterapkan dalam penentuan kebijakan publik. Komponen kedua yakni **Meso Analysis (Analisis Meso)** Analisis meso adalah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, dan merumuskan kebijakan. Pendekatan ini berfokus pada ruang lingkup yang mencakup masalah yang ada. Komponen ketiga yaitu **Decision Analysis (Analisis Keputusan)** Analisis keputusan adalah kajian tentang proses pembuatan keputusan serta analisis kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan ini berkaitan dengan penggambaran cara di mana suatu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat. Komponen terakhir adalah **Delivery Analysis (Analisis Pelaksanaan)** Analisis pelaksanaan adalah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi dan menilai dampak dari perubahan. Pendekatan ini berkaitan dengan penggunaan tujuan pelaksanaan yang didasarkan pada proses kebijakan, yang dirancang melalui upaya untuk memodelkan serangkaian langkah yang rasional (RF Sekarapriharum, 2022).

Dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat menganalisis penyusunan *policy paper* dalam penguatan strategi kebijakan pengembangan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur. Dengan pendekatan yang dipilih peneliti juga diharapkan dapat menjadi evaluasi

dalam memperbaiki kelemahan – kelemahan yang ada dalam organisasi, tata kelola, dan sumber daya pendukung riset dan inovasi di daerah.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Tugas utama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah mendukung Gubernur dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan riset dan inovasi. Ini mencakup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian semua kegiatan yang melibatkan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, penemuan, dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. BRIDA juga memiliki tanggung jawab untuk merancang rencana induk dan peta jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah di berbagai sektor kehidupan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Fungsi BRIDA mencakup pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dan pembinaan dalam penelitian dan inovasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, BRIDA juga bertugas menyusun rencana program, anggaran, kelembagaan, serta sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan riset dan inovasi. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset merupakan salah satu fungsi BRIDA, yang juga mencakup kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. BRIDA diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis serta supervisi terkait riset dan kemitraan penelitian. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan riset juga menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, BRIDA akan mengelola sistem informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi serta

melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki banyak inovasi daerah, dengan rata-rata 130 inovasi yang dikembangkan setiap tahun oleh perangkat daerah. Gubernur diwajibkan melaporkan penerapan inovasi kepada Menteri Dalam Negeri, yang kemudian menilai melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) dan memberikan penghargaan dalam acara Innovative Government Award (IGA). Dari tahun 2019 hingga 2023, IID Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi, meskipun pada tahun 2022 berhasil meraih tiga predikat Daerah Terinovatif I. BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dibentuk untuk mendukung pengembangan budaya inovasi, dan penyelenggaraan Inotek Award berkontribusi positif terhadap peningkatan IID. Meskipun skor IDSD Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 3,78 pada tahun 2023, posisinya menurun dari peringkat kedua menjadi keempat. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya skor Pilar Inovasi. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan kebijakan, serta merumuskan alternatif kebijakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka peneliti dapat melakukan analisis mendalam terkait penguatan strategi kebijakan pengembangan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur. Analisis ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam memperkuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan riset dan inovasi. Rencana tindakan yang disusun diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta meningkatkan manfaat riset dan inovasi di daerah

untuk mendukung pembangunan dan mengatasi berbagai masalah. Fokus utama adalah pada penguatan strategi kebijakan dalam pengembangan kelembagaan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur serta di Kabupaten/Kota, sesuai dengan yang diatur dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RI PJPID) Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2029. Dengan demikian, analisis ini memberikan pedoman untuk rencana tindak dalam pengembangan kelembagaan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur.

Meta Analysis (Analisis Meta)

Dalam analisis meta peneliti melakukan observasi *policy paper* tersebut, dimana terdapat metode dalam menentukan kebijakan itu untuk pendekatannya menggunakan deskriptif kualitatif, dalam metode pengumpulan datanya menggunakan **Focus Group Discussion (FGD)** FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan riset dan inovasi di daerah, serta narasumber yang memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan. Kegiatan FGD dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi fokus, menggunakan metode tatap muka langsung atau secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengumpulkan data primer mengenai topik kebijakan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Kemudian studi dokumen dari berbagai sumber sekunder, Studi dokumen dalam metode penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari dokumen tertulis atau visual. Dengan menggunakan metode ini, data sekunder yang diperoleh dapat memberikan informasi yang akurat, historis, kontekstual, dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Sumber informasi ini berasal dari berbagai dokumen dan peraturan

perundang-undangan yang diperoleh dari sumber terpercaya, baik langsung dari pemegang data, media cetak, buku, internet, dan lainnya. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk mendapatkan data sekunder serta landasan teori yang relevan dan praktek empiris yang terjadi. Wawancara merupakan tahap terakhir yang melibatkan interaksi tanya jawab antara Tim Pelaksana dan Narasumber atau responden mengenai topik pengembangan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Wawancara dengan Narasumber akan dilakukan dalam format konsultasi antara Tim Pelaksana dan Narasumber dari Pemerintah Pusat, sedangkan wawancara dengan responden akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam topik tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data primer dan sekunder terkait permasalahan serta alternatif solusi yang ada.

Untuk mengupas dan menetapkan kebijakan dalam bentuk rencana tindak, metode analisis yang digunakan adalah Gap Analysis. Metode ini sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membandingkan kinerja saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa depan. Gap Analysis dapat dimaknai sebagai perbandingan antara kinerja yang ada dengan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi apakah sistem yang ada, khususnya sistem riset dan inovasi di daerah, telah memenuhi target atau harapan yang telah ditetapkan. Dalam waktu singkat, Gap Analysis digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Penerapan analisis kesenjangan ini memberikan berbagai manfaat, termasuk identifikasi masalah atau kesenjangan terkait penggunaan sumber daya dan

pencapaian harapan. Dengan menggunakan analisis kesenjangan untuk memperkuat kebijakan, penting untuk melaksanakan semua kegiatan dan rencana yang direncanakan untuk masa depan, karena analisis ini akan menunjukkan perkembangan pelaksanaan kebijakan. Kesenjangan antara situasi aktual dan situasi yang diinginkan di masa depan akan mendorong pencarian solusi untuk menutup celah tersebut. Solusi tersebut dapat berupa inisiatif atau tindakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi atau pemahaman yang lebih baik tentang cara memperbaiki kinerja yang ada. Gap Analysis dalam kajian ini mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, menentukan area pengembangan kelembagaan dengan fokus pada organisasi, tata kelola, dan sumber daya pendukung. Selanjutnya, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi daerah untuk pemanfaatan riset dan inovasi. Kemudian, Kondisi yang diinginkan dirumuskan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan, serta memperhatikan peraturan yang harus diikuti oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan dan menyusun rencana tindak lanjut untuk pengembangan kelembagaan riset dan inovasi.

Meso Analysis (Analisis Meso)

Dalam kajian ini, analisis meso digunakan untuk memahami dan mendefinisikan masalah yang dihadapi dalam pengembangan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini berfokus pada interaksi antara berbagai aktor dan elemen dalam ekosistem riset, serta bagaimana kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaan yang ada. Masalah utama yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah kurangnya sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di daerah. Meskipun pemerintah telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk mengorkestrasi kegiatan ini, tantangan yang ada mencakup kapasitas kelembagaan yang masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan output dari riset dan inovasi tidak optimal, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Setelah mendefinisikan masalah, langkah selanjutnya adalah menetapkan agenda yang mencakup isu-isu strategis yang perlu ditangani. Agenda tersebut meliputi penguatan kapasitas kelembagaan BRIDA, peningkatan kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta, serta penyusunan rencana induk untuk penelitian dan inovasi yang lebih terintegrasi. Dengan menetapkan agenda ini, diharapkan dapat tercipta fokus yang jelas bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem riset. Berdasarkan analisis meso yang dilakukan, kebijakan yang dirumuskan harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlu ada penguatan struktur organisasi BRIDA agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Kedua, tata kelola riset harus diperbaiki dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain yang telah berhasil mengembangkan ekosistem riset mereka. Ketiga, alokasi anggaran untuk kegiatan riset harus ditingkatkan agar dapat mendukung berbagai inisiatif penelitian yang relevan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan ini harus bersifat inklusif dan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Decision Analysis (Analisis Keputusan)

Dalam kajian ini, analisis keputusan digunakan untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terkait dengan pengembangan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur. Analisis ini berfokus pada cara di mana keputusan diambil, serta bagaimana kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan tersebut dapat dirumuskan secara efektif. Kajian bertujuan untuk menggambarkan dinamika yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam kebijakan riset. Proses pengambilan keputusan dalam riset dan inovasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta. Setiap aktor memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, yang harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Kajian ini mengungkapkan bahwa keputusan sering kali dibuat berdasarkan analisis data yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan nasional dan tren global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis kebijakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan keputusan. Analisis kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan yang diusulkan tidak hanya perlu mengatasi tantangan saat ini, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam dunia riset dan inovasi. Dalam konteks ini, penerapan pendekatan berbasis bukti **evidence-based policy** sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang akurat.

Analisis keputusan dalam kajian ini menggambarkan bagaimana serangkaian keputusan diambil melalui proses sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah yang ada dalam ekosistem riset dan inovasi, diikuti dengan pengumpulan data melalui metode seperti **Focus Group Discussion (FGD)**, wawancara, dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi perumusan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan riset di daerah.

Tidak ada kebijakan yang dapat berhasil diimplementasikan tanpa dukungan dari berbagai aktor, baik secara teknis maupun operasional. Banyak aktor terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Namun, dalam penguatan kelembagaan riset dan inovasi, terdapat beberapa aktor kunci yang memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan. BRIN bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap riset dan inovasi di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi di provinsi serta bertindak sebagai wakil Pemerintah Pusat. BRIDA Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai pelaksana tugas Gubernur, baik sebagai Kepala Daerah maupun wakil Pemerintah Pusat, yang mengorkestrasi riset dan inovasi di daerah. Bupati atau Walikota bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, BRIDA atau Bapperida serta perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan riset dan inovasi di Kabupaten/Kota juga

berperan dalam mengorkestrasi kegiatan tersebut.

Delivery Analysis (Analisis Pelaksanaan)

Dalam kajian ini, analisis pelaksanaan digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur serta menilai dampak dari perubahan yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Analisis ini berfokus pada bagaimana tujuan pelaksanaan ditetapkan berdasarkan proses kebijakan yang ada, serta upaya untuk memodelkan serangkaian langkah rasional yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Analisis pelaksanaan bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan efektif. Kajian ini mengevaluasi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai langkah pemerintah untuk mengintegrasikan dan mengorkestrasi aktivitas riset dan inovasi di daerah. Meskipun BRIDA didirikan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas riset, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya cukup signifikan. Masalah seperti kelemahan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan alokasi anggaran yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Selain mengevaluasi implementasi, analisis ini juga menilai dampak dari perubahan yang dihasilkan oleh kebijakan baru. Dampak ini mencakup perubahan dalam cara lembaga pemerintah daerah beroperasi, interaksi antara berbagai aktor dalam ekosistem riset, serta hasil konkret dari kegiatan riset yang dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan telah memberikan manfaat nyata bagi pengembangan riset dan

inovasi di daerah. Analisis pelaksanaan juga berkaitan erat dengan proses kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan. Dalam kajian ini, tujuan pelaksanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam konteks global dan nasional. Kebijakan perlu dirancang tidak hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam merumuskan kebijakan, agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam melakukan analisis pelaksanaan, kajian ini memodelkan serangkaian langkah rasional yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis situasi saat ini, serta perumusan alternatif kebijakan. Setiap langkah harus didasarkan pada data dan informasi yang tepat agar keputusan yang diambil dapat mengurangi risiko kegagalan. Dengan demikian, analisis pelaksanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merumuskan langkah-langkah selanjutnya. Melalui analisis pelaksanaan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan riset dan inovasi diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Dengan mengevaluasi implementasi dan dampak dari perubahan kebijakan, serta memahami proses pembuatan keputusan yang mendasarinya, pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong pengembangan Iptek di daerah. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai

aktor serta dukungan sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN

Penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Provinsi Jawa Timur merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi yang berkontribusi pada pembangunan daerah. BRIDA berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, dengan fokus pada penelitian yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BRIDA tidak hanya bertindak sebagai pelaksana riset, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembina yang mendukung kebijakan riset dan inovasi. Salah satu aspek penting dalam penguatan BRIDA adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Untuk mencapai tujuan ini, BRIDA perlu memastikan bahwa stafnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk memperluas jaringan penelitian dan menciptakan sinergi dalam berbagai inovasi. Dalam prosesnya, BRIDA harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional, termasuk integrasi fungsi dengan lembaga lain di daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program riset. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan ini cukup signifikan. Kapasitas kelembagaan yang masih lemah terlihat dari kurangnya organisasi yang memadai, tata kelola yang kurang baik, serta kekurangan sumber daya manusia terlatih. Banyak pemerintah daerah belum membentuk lembaga penelitian yang terpisah, dan anggaran untuk kegiatan riset sering kali tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan perlunya rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ada. Secara keseluruhan, penguatan kelembagaan BRIDA diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk mendukung inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengatasi berbagai tantangan melalui rekomendasi kebijakan yang tepat, BRIDA dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi pada pencapaian visi "Indonesia Maju 2045". Melalui langkah-langkah strategis ini, BRIDA dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192, 106885, 1-38. <https://jdih.batan.go.id/index.php?p=51&n=518&k=2021> Perpres

RF Sekarapriharum. (2022). Tinjauan Pustaka: Analisis Kebijakan Teori. 6-28.

Ummah, M. S. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1-14.

DAFTAR PUSTAKA

Daerah, I. (2021). Peran litbang dalam proses perencanaan dan inovasi daerah.

Dimiyati, M. (2019). Masalah Riset-Inovasi Indonesia. November.

Fitriana, R. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Procedia Manufacturing*, 1(22), 1-17.

Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan.Bpk.Go.Id, 052692, 1-1187.

INDONESIA, K. B. R. D. I. N. R. (2023). Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah. -.

Indonesia, P. R. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Negara Republik Indonesia, 1-83. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019>

Paramita, K. (2022). Analisis Pendapatan Pada Warung Tegal 2000 di Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi Utara. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 12(2004), 6-25.